

WUJUD, MAKNA DAN AKUNTABILITAS “AMAL USAHA” SEBAGAI ASET EKONOMI ORGANISASI RELIGIUS FEMINIS

Suryan Widati¹⁾
Iwan Triuwono²⁾
Eko Ganis Sukoharsono²⁾

¹⁾Politeknik Negeri Malang, Jl. Soekarno Hatta 09 Malang 65144

²⁾Universitas Brawijaya
Email: widamuhadjir@gmail.com

Abstract: Form, Meaning and Accountability “amal usaha” as Economic Asset for Feminist Religious Organization. *This research explores the form, meaning and accountability of “amal usaha” as economic assets in “Persyarikatan Aisyiyah” as religious organization. By using phenomenological approach, the results of the research shows that Aisyiyah as religious organization exerts efforts to gain profit to fulfil the organization need. Further findings show that, first, “amal usaha” as media to do God’s will in the form of “amal (worship)” and second “usaha (effort)” as an economic effort to gain fund. Accounting is needed as accountability tool in economic efforts. This asset is expected to be appears in the syari’ah accounting study.*

Abstrak: Wujud, Makna dan Akuntabilitas “amal usaha” Sebagai Aset Ekonomi Organisasi Religius Feminis. Riset ini mengeksplorasi wujud, makna dan akuntabilitas dari “amal usaha” sebagai aset ekonomi di “Persyarikatan Aisyiyah” sebagai suatu organisasi religius. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, hasil riset ini menunjukkan bahwa Aisyiyah melakukan usaha mendapatkan laba untuk kepentingan organisasi. Temuan lebih lanjut menunjukkan bahwa, pertama, “amal usaha” merupakan media beribadah kepada Tuhan, dan kedua, ia merupakan usaha untuk mendapatkan dana. Usaha ekonomi ini membutuhkan akuntansi sebagai alat akuntabilitas. Aset ini diharapkan dapat muncul di studi akuntansi syariah.

Kata kunci: akuntabilitas, akuntansi syariah, aset ekonomi, organisasi religius

Aset merupakan salah satu pos dalam laporan keuangan yang penting. Beberapa definisi unsur laporan keuangan menggunakan aset sebagai sudut pandang. Misalnya hutang yang didefinisikan sebagai selisih aset dengan ekuitas pemilik. Demikian juga ekuitas yang didefinisikan sebagai selisih aset dengan kewajiban. Aset lebih dulu dikenal dengan istilah harta, kekayaan, atau aktiva. Besar kemungkinan langkah IAI menggunakan istilah aset dan bukannya aktiva atau harta dalam rangka harmonisasi standar akuntansi keuangan internasional. Padahal, penterjemahan istilah asing tidak bisa serta merta memiliki kandungan makna yang sama dengan istilah baru milik suatu budaya. Evans (2004) menyatakan adanya hubungan yang erat an-

tarah bahasa dan budaya, sehingga penerjemahan istilah akuntansi tidak bisa meninggalkan budaya dimana akuntansi itu digunakan (sebagai *target language*). Contohnya penelitian Sudibyo (2001), menyatakan adanya kesalahan perspektif filosofis di kalangan akuntan terhadap pengertian makna “bukti” atau “*evidential matters*” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi istilah bukti formal sehingga mengalami marginalisasi pengertian. Pengertian yang sama bisa diterapkan pada istilah “aset” yang bermula dari istilah “*assets*” yang mulai diadopsi oleh IAI untuk mengacu pada hal yang sama dengan aktiva atau kekayaan.

Stamper et, al (2000) melihat bahwa dalam suatu organisasi terdapat tanda-tanda (*signs*) dan



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 2
Nomor 3
Halaman 369-540
Malang, Desember 2011
ISSN 2086-7603

kaidah/norma (*norms*) tertentu yang membentuk sistem informasi termasuk di dalamnya akuntansi. Akuntansi *mainstream* yang bersifat sekuler, menjadikan karakteristik organisasi yang mempraktikkannya memiliki sifat yang sama. Hardy dan Ballis (2005) menyatakan, perbedaan antara aktifitas sakral dan sekuler pada suatu organisasi keagamaan menjadikan praktik akuntan dan akuntansi bersifat ambigu.

The sacred and secular framework assumes that there is an uncomfortable fit and constant friction between primary sacred activities within religious organizations and secondary secular activities that are being used to service organizational needs. (Hardy dan Ballis 2005:240)

Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah *instrument* akuntansi *mainstream* berkaitan dengan aset akuntansi yang selama ini ada akan sesuai bila diterapkan pada suatu organisasi keagamaan untuk mendukung ritual/aktivitas keagamaannya sekaligus aktivitas sosialnya?

Definisi akuntansi yang meliputi aspek proses sosial, politik dan ekonomi ini sejalan dengan posisi akuntansi syariah yang memandang realitas bagian integral dari eksistensi Allah. Akuntansi sebagai ilmu buatan manusia dengan demikian bersifat sama. Akuntansi bukan hanya meliputi realitas fisik yang nampak, seperti klaim Akuntansi *Mainstream*. Di tangan Descartes, realitas di dalam filsafat Barat, tereduksi menjadi pikiran dan materi (Nasr 2005:139). Akibat lebih lanjut dari pemisahan ini, alam direduksi menjadi kuantitas. Makrokosmos manusia telah kehilangan struktur tripartitnya: Ruh (*spiritus*), jiwa (*anima*), dan badan (*corpus*), sehingga ia tidak lagi menjadi sebuah pikiran (*mind*) yang secara misterius terkait dengan sebuah badan yang tak bisa diukur (Nasr 2005:139).

Akuntansi syariah antara lain melakukan dekonstruksi atas akuntansi modern (Triyuwono, 2009) yang bersifat dominan dalam praktik dan terbatas hanya realitas fisik semata. Sementara itu dalam Islam, realitas tidak terbatas pada unsur materi saja, tetapi juga realitas psikis dan spiritual. Realitas materi, psikis, dan spiritual eksis secara dependen, integral, dan tidak dapat dipisahkan dengan *Asma'Sifatyyah* (sifat-sifat Tuhan) dan Tuhan sendiri sebagai reali-

tas tertinggi dan absolut dan sebagai pusat segala sesuatu (Triyuwono 2007 dan Bakar 1994 dalam Triyuwono 2009:253).

Tabel 1
Hierarki Ralitas

Tingkat	Realitas
5	Ralitas Tertinggi dan Absolut
4	<i>Asma' Sifatyyah</i>
3	Spiritual
2	Psikis
1	Material

Sumber: Triyuwono (2009:253)

Untuk itu definisi aset dalam organisasi *religious feminis* tidak lepas dari tujuan akuntansi syariah yaitu mencapai kesadaran ketuhanan. Aset dimiliki, dimanfaatkan dan dilaporkan dalam rangka mencapai kesadaran ketuhanan (*god consciousness*). Sehingga kajian makna aset akuntansi syariah pada tataran teoritis-filosofis-ideologis akan lebih sesuai bila digali pada jenis organisasi keagamaan yang notabene tidak mencari laba.

Penelitian tentang makna tanda atau simbol dalam akuntansi telah banyak dilakukan. Baik dalam ranah penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian Belkaoui (1980), menyoroti perbedaan persepsi atas makna konsep akuntansi antar kelompok yang berbeda (akademis, akuntan, dan mahasiswa), yaitu dengan menggunakan pendekatan *socio linguistik*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, kelompok akuntan dengan latar belakang berbeda, akan menggunakan kode linguistik yang berbeda pula dikarenakan perbedaan tujuan dan karakteristik organisasinya (Belkaoui 1980:362).

Penelitian Macintosh *et al.* (2000) juga membahas pemahaman simbol akuntansi yaitu *income* dan *capital* dengan menggunakan dasar teori *order of simulacra* yang digagas Baudrillard. Hasil dari penelitian ini, *income* dan *capital* ternyata tidak merujuk pada obyek atau peristiwa yang nyata (atau dikatakan sebagai *simulacra murni*). Artinya referen *income* dan *capital* adalah pada dirinya sendiri, dan berputar-putar membentuk dunia hiperrealitas. Hal ini dikarenakan timbulnya perbedaan interpretasi yang mempengaruhi efektivitas komunikasi.

Penelitian Riduwan (2009) tentang makna simbol laba mengungkapkan bahwa realitas yang sesungguhnya ingin direpresentasikan oleh simbol ini ternyata diinter-

pretasikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi laba, yaitu akuntan. Macintosh *et al.* (2000:13) juga berpendapat bahwa tidak hanya pada simbol laba, banyak simbol akuntansi yang tidak memiliki rujukan secara jelas pada objek dan peristiwa yang nyata, sehingga akuntansi tidak secara penuh menjalankan fungsinya untuk penyajian informasi.

Harried (1972) melakukan penelitian yang meminta partisipannya untuk memberikan makna kemudian menafsirkan simbol-simbol akuntansi yang dinyatakan dalam istilah-istilah teknis akuntansi dan nama-nama akun neraca, laporan laba-rugi, dan laporan aliran dana. Termasuk pula istilah aset akuntansi. Hasilnya, tingkat pemahaman dan kemampuan pemaknaan simbol-simbol akuntansi antara dua kelompok partisipan (*sophisticated* dan *unsophisticated participants*) menunjukkan hasil sama-sama rendah. Harried (1972:376) menyimpulkan bahwa fakta ini menunjukkan adanya masalah semantik dalam komunikasi informasi akuntansi kepada pihak eksternal.

Harried (1973) mengulang penelitiannya tentang masalah semantik informasi akuntansi. Kali ini dia menggunakan responden yang berbeda, antara penyedia informasi akuntansi (*preparer*) dan pemakai informasi akuntansi (*user*). Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tingkat pemahaman dan kemampuan pemaknaan terhadap istilah teknis dan simbol-simbol bahasa akuntansi oleh penyedia dan pengguna laporan keuangan relatif tinggi. Namun ada beberapa pemahaman yang berbeda antara keduanya berkaitan dengan istilah tertentu seperti beban depresiasi dan *goodwill* (Harried 1973:133).

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Oliver (1974), yang menguji pemahaman responden pada wilayah semantik yang berbeda. Wilayah semantik yang berbeda ini adalah pada "konsep-konsep" akuntansi, seperti: definisi akuntansi, konsep laba, konsistensi, pengungkapan, penandingan, penilaian, biaya (*cost*), serta penghasilan dan beban (*expenses*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntan pendidik memiliki tingkat pemahaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan akuntan publik dan profesi lainnya (analisis keuangan, dealer sekuritas, *corporate finance executive*, *investment bankers* dan pegawai bank).

Penelitian tentang makna, konsep, dan simbol akuntansi di atas masih dilakukan dalam konteks organisasi yang bersifat *profit oriented*, yaitu perusahaan (*corporate*). Penelitian yang menggali makna simbol, tanda, teks akuntansi yang dilakukan dalam ranah akuntansi syariah dan dalam konteks organisasi yang tidak berorientasi laba (*non-profit oriented*) atau pada organisasi keagamaan (*religious organization*) masih belum ada hingga saat ini. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pintu masuk (*entry point*) penggalian makna tanda, teks dan simbol akuntansi sebagai salah satu upaya pengembangan teori akuntansi syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dalam ranah kualitatif. Penjelasan tentang penelitian kualitatif adalah seperti yang digambarkan Denzin dan Lincoln (1994:4) berikut ini:

Qualitative research is many things to many people. Qualitative research, as a set of interpretive practices, privileges no single methodology over any other. As a site of discussion, or discourse, qualitative research is difficult to define clearly

Penelitian kualitatif dapat menggunakan beberapa metode untuk menjawab pertanyaan penelitian. Akibatnya, Secara ideal, melakukan riset kualitatif memerlukan "a strong commitment to study a problem" dan "demands time and resources" (Sukoharsono 2006:232). Pemahaman atas komitmen yang kuat atas penelitian kualitatif mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan data dan waktu penelitian.

Moustakas (1994) menyatakan bahwa fenomenologi pada dasarnya berfokus pada penampakan benda, melihat kembali benda apa adanya. Fenomenologi sangat berkaitan dengan keseluruhan pemahaman, diperoleh dengan menguji entitas dari berbagai sisi, sudut pandang, dan perspektif sehingga dicapai sebuah pandangan yang sama terhadap esensi sebuah fenomena atau pengalaman. Fenomenologi juga mencari makna dari berbagai penampakan hingga mencapai esensinya melalui proses intuisi dan refleksi pada tindakan yang dialaminya.

Penelitian fenomenologi menghendaki peneliti untuk bisa mendeskripsikan. Moustakas (1994) menjelaskan bahwa fe-

nomenologi lebih merupakan deskripsi pengalaman-pengalaman. Maksudnya, adalah untuk menggambarkan seakurat mungkin sebuah fenomena, sekaligus tetap menjaga keadaan sebenarnya seperti yang nampak pada diri informan (*gatekeeper*). Sementara itu suatu fenomena yang nampak mengandung unsur sosial dan psikologis (Welman dan Kluger 1999).

Proses pengumpulan data dalam fenomenologi adalah tahap pemahaman atas sesuatu dari sudut pandang informan (*understanding the world from the subjects point of view, to unfold meaning of people experiences* (Groenewald 2004:13)). Proses pemahaman ini kemudian diikuti dengan tahap mengingat kembali (*memoing*) (Groenewald 2004:13).

Proses menggali dan mengumpulkan data dari para informan dilakukan dengan teknik wawancara yang mendalam (*indepth interview*) dan peneliti sebagai partisipan. Dari data yang terkumpul dibuat kompilasi tematik, data dipilah-pilah ke dalam sub-sub tema sesuai dengan tema umum penelitian. Termasuk pada tahap ini peneliti berusaha keras melakukan pemahaman ke dalam alam kesadaran subyek (*contemplating the content of mind*) yang berupa aktivitas-aktivitas mengingat (*remembering*), meresapi (*perceiving*), dan mengingini (*desiring*) di mana ketiga jenis aktivitas kesadaran tersebut memiliki keterarahan (*directedness*) pada "sesuatu" yang di dalam metode *fenomenologi* disebut intensionalitas (*intentionality*) (Moustakas 1994: 55). Dan "sesuatu" dalam penelitian ini adalah tema penelitian itu sendiri yaitu apa dan bagaimana subyek penelitian memberikan makna aset sesuai dengan sifat/karakteristik entitasnya serta posisinya dalam entitas.

Amal usaha adalah istilah yang mengacu pada sekolah-sekolah (TK ABA dan Perguruan Tinggi), panti asuhan, Rumah Sakit/Klinik, serta Bina Usaha Ekonomi (BUEKA). Konstruksi ini seperti yang dinyatakan oleh Berger dan Luckmann (1990) sebagai teori konstruksi sosial, yaitu ketika menyebut istilah "amal usaha", dalam pandangan pengurus mengacu pada sekolah-sekolah (TK ABA dan Perguruan Tinggi), panti asuhan, Rumah Sakit/Klinik, serta Bina Usaha Ekonomi (BUEKA). Dalam diri pengurus terdapat pemahaman bahwa yang dimaksud aset dalam persyarikatan adalah amal usaha.

Tadi ketika sampai di Pandaan, kita mampir untuk melihat Amal usaha Aisyiyah yang terkecil yaitu TK, yang luar biasa dikelola dengan sangat baik. Dan saat ini, kita mengunjungi Amal usaha persyarikatan yang besar, terbukti pada tahun 2005 kemarin, dapat menampung warga Muhammadiyah dari seluruh Indonesia yang sedang bermuktamar. Itu semua bukti bahwa kita punya Amal usaha yang dapat memberikan motivasi kita semua dalam berorganisasi" (Ibu Mahsunah Syakir¹)

"ranting kami berdiri karena menerima wakaf tanah yang kami wujudkan menjadi Amal usaha TK ABA. Dan menurut saya, sekolah inilah Amal usaha sebagai aset kami" (ibu Noor Harini²).

Amal usaha dengan upaya ekonominya menjadikan timbulnya motif mencari keuntungan materi sebagai sarana menjamin kelangsungan proses ibadah. Amal usaha yang berkembang dan besar, kecil kemungkinan untuk tutup atau bangkrut apabila dikelola dengan alat rasional termasuk Akuntansi. Amal usaha diusahakan agar tidak membebani persyarikatan, dan bahkan dapat memberikan keuntungan, baik secara ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi dibatasi sebagai sarana beribadah dan menjalankan misi *Amar Ma'ruf nahi Munkar*. Pengurus dan simpatisan sadar, Amal usaha yang dikelola secara profesional dapat menjadi media yang efektif untuk memantapkan diri berkhidmat di prsyarikatan. Untuk itu Aset Ekonomi ini dimaknai sebagai media menjalankan ibadah berwujud Amal usaha.

Amal usaha dengan upaya ekonomi didalamnya ini dilatarbelakangi adanya kesadaran pentingnya sumber daya finansial untuk menjalankan Amal usaha sekaligus mewujudkan visi dan misi Organisasi. Wujud Amal usaha mengakomodasi bentuk Realitas Fisik dan Ekonomi untuk Tujuan Sosial. Diterimanya definisi amal usaha sebagai aset, menjadikan individu pengurus tidak hanya memahami definisi orang lain, tetapi turut mengkonstruksi definisi bersama.

1 Ibu Mahsunah Syakir adalah bendahara Pegurus Pusat Aisyiyah periode 2005-2010.

2 Ibu Noor Harini adalah Pengurus Ranting Aisyiyah Perum Griya Shanta, Malang.

Aisyiyah adalah termasuk entitas sosial yaitu entitas yang tidak berorientasi laba (organisasi nirlaba). Organisasi nirlaba didefinisikan oleh Anthony dan Govindarajan (2005, 406) sebagai organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada, atau untuk manfaat dari, anggota nya, penjabatnya, maupun direktornya, namun organisasi tersebut dapat mengkompensasi karyawannya, termasuk pengelola dan anggotanya, untuk jasa yang diberikan dan untuk barang-barang yang dipasok. Namun, dari definisi ini tidak secara serta-merta melarang organisasi untuk memperoleh laba. Definisi tersebut hanya melarang pendistribusian laba kepada pihak tertentu (pemilik atau pengurus).

"Bila ada program yang mendatangkan keuntungan, itu kita kelola secara professional. Kenapa? Karena kita mempekerjakan staf yang tidak hanya satu atau dua orang saja. Dan mereka itu dibayar. Kita memikirkan bagaimana bisa menghasilkan uang semata-mata agar organisasi tetap bisa menjalankan program-programnya yang itu untuk kepentingan masyarakat"(Ibu Sugiarti³).

Beberapa Amal usaha dalam persyarikatan memiliki karakteristik khusus, yaitu tidak ada ukuran laba, semata-mata berdiri untuk tujuan sosial. Contohnya panti asuhan, klinik dan sekolah. Akibatnya indikator dalam mencapai tujuan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif misal dengan laba. Sementara itu ada beberapa Amal usaha ada yang masih bermotif laba seperti rumah sakit, perguruan tinggi dan koperasi. Jenis Amal usaha ini mempertimbangkan tujuan ekonomi yang digunakan untuk menjamin tetap berlangsungnya kegiatan operasional dan pengembangan organisasi.

Tujuan pendirian Muhammadiyah oleh seorang pendirinya yang saudagar, dilatarbelakangi tujuan untuk meredam gerakan kolonialisasi Belanda. Pada waktu itu, Belanda memberikan dukungan yang besar atas pendirian Sekolah dan Rumah Sakit yang dilakukan oleh gerakan Kristen Belanda. Dengan mengadopsi strategi Belanda ini, para pendiri persyarikatan menjadi sadar,

mencari keuntungan ekonomi untuk membesarkan amal usaha bukanlah suatu dosa.

"Seperti Pengurus Daerah Aisyiyah (PDA) Ponorogo itu, dia unggul dalam hal kegiatan ekonominya. Anggotanya kebanyakan memang pedagang, bukan pegawai negeri seperti disini yang mendominasi. Banyak amal usaha mereka yang menguntungkan dan besar. Akibatnya, Aisyiyah disana maju bu" (Ibu Rukmini⁴).

Tinjauan sejarah juga mengulas profil Nabi Besar Muhammad SAW yang berprofesi sebagai pedagang yang jujur. Juga betapa perjuangan Nabi Muhammad SAW mendapatkan dukungan dana dari saudagar seperti istri beliau sendiri, Khadijah yang seorang saudagar.

Sebagian besar amal usaha berdiri dari sumber wakaf. Akuntansi, sebagai suatu ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh bentuk organisasi, di samping faktor-faktor lain seperti: sistem ekonomi, politik, sosial, ideologi, dan lain-lainnya. Akuntansi Syariah sebetulnya tidak terlepas dari konsep organisasi Syariah yang menggunakan metafora "amanah" (Triyuwono dan As'udi, 2001, Triyuwono, 2009) seperti juga dalam Aisyiyah. Metafora wakaf mengatur subjek penerima wakaf (*Nazhir* yaitu Aisyiyah) adalah pihak yang bertanggungjawab merealisasikan harapan pemberi wakaf (wakif) atas kemanfaatan harta yang telah dia wakafkan. Amal yang tidak terputus hanya bisa terwujud kalau wakaf dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan atau dikelola secara produktif. Salah satu contoh nyata adalah pembangunan *Islamic College Aisyiyah* (ICA) yang berdiri di atas tanah wakaf. ICA dimaksudkan sebagai pesantren/asrama mahasiswa yatim. Namun pembangunan masjid di area ICA didahulukan. Strategi membuat wakaf produktif dinyatakan berikut:

"Ini kita selesaikan dulu masjidnya, supaya bisa segera kita gunakan untuk acara ibu-ibu. Nah saat acara kumpul-kumpul itulah biasanya kita bisa mendapatkan kesempatan memperoleh dana. ibu sendiri kan tau, anggota kita kalau kumpul tidak hanya kumpul saja. Banyak yang sambil

3 Ibu Sugiarti, adalah sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Timur periode 2005-2010

4 Ibu Rukmini adalah Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang

bawa dagangan. Biasanya mereka itu ikut nyumbang.” (Ibu Jufri Aksana⁵).

Fenomena wakaf produktif juga ditemui pada pendirian salah satu sekolah milik Aisyiyah. TK itu didirikan dengan strategi tertentu agar tetap produktif, dan tidak bergantung pembiayaan dari pihak lain. Pengurus tidak mengharapkan materi atas pengelolaan sekolah tersebut. Semua hasil yang diperoleh dipergunakan untuk operasional dan pengembangan sekolah semata.

“beberapa ibu di tempat kami bertemu dan muncullah gagasan membentuk TK sekaligus membentuk ranting Aisyiyah yang baru. Tapi kami tidak mau mendirikan sekolah asal-asalan. Kami bikin strategi, membuat sekolah untuk kalangan menengah. Itu yang kita sasar bu. Soalnya di dekat situ kan sudah ada TK Anak Sholeh, pasar mereka jelas bu. Sementara itu di sebelah barat ada TK lain yang kami lihat kok sarannya tertentu juga. Nah kami bikin TK untuk golongan yang tidak mungkin masuk di keduanya. Dan ternyata strategi kami berhasil. Saking banyaknya yang daftar, kami tidak kesulitan untuk membiayai guru-guru dan bisa mengembangkan fasilitas dengan dana kami sendiri. Kami ini mengelola gak dapat gaji lho. Malah kami sering tekor. Tapi ya gimana lagi. Inilah simpanan saya bu. Saya ikhlas menjalaninya. Toh saya mendapatkan hasil yang lebih-lebih ditempat lain”(Ibu Noor Harini).

Pencarian motif ekonomi dalam bentuk uang/materi terbukti bukanlah suatu ambisi yang buruk, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Pencarian materi bukan lagi sebagai sasaran utama, atau strategi dominan, tetapi sebagai sarana agar kegiatan dakwah tetap bisa berjalan.

Pasal 37 Anggaran rumah tangga Aisyiyah (PP Aisyiyah, 2007) mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan berbunyi: Seluruh kekayaan organisasi, termasuk kekayaan Badan Pembantu Pimpinan, amal usaha pada semua tingkatan, baik

yang diperoleh dari hasil pembelian, hibah, wakaf, tukar-menukar, dan lain-lain secara hukum milik Pimpinan Pusat. Pernyataan ini secara jelas menggambarkan Pimpinan Pusat sebagai sebagai *principal* atau pemilik amal usaha, sedangkan manajer suatu Amal usaha (kepala sekolah, kepala klinik, ketua panti, dst) sebagai agen yang menjalankan operasional Amal usaha. Kegiatan operasional dalam mengelola ini terwujud dalam bentuk sistem anggaran yang ditetapkan oleh pimpinan pusat. Namun pada kenyataannya selama di lapangan, peneliti tidak melihat pedoman pengelolaan yang secara kaku harus dijalankan. Pengelola Amal usaha diberi kewenangan penuh untuk mengelolanya. Aisyiyah sebagai organisasi religius menjamin mekanisme pembinaan iman ini sebagai pondasi utama mengelola Amal usaha.

“Kalau kita sudah niat beramal di persyarikatan, baik dengan materi, ilmu, waktu atau tenaga, imbalannya tidak hanya materi, tetapi juga dapat pahala. Tapi kalau berbuat curang, balasannya jelas, biasanya akan dapat azab dari Allah, itu terbukti dari beberapa kasus kecurangan, pasti kena musibah, pasti kuwalat”(Ibu Romlah⁶).

Mekanisme lain yang ada dalam hubungan pimpinan bawahan tampak dari pendirian suatu cabang Aisyiyah. Pada tahun 2006, dibentuk cabang Aisyiyah khusus atau istimewa. Cabang ini istimewa karena belum ada bentuk cabang seperti ini sebelumnya. Biasanya suatu cabang atau ranting, ada dalam batasan wilayah, tetapi cabang khusus ini dibentuk pada suatu Amal usaha yaitu di salah satu PTM di Malang. Selanjutnya cabang ini dinamakan cabang khusus Aisyiyah.

“Cabang kita ini sebenarnya bukan di bawah Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Malang. Tetapi kita tetap satu kesatuan, tidak ada pemisahan yang kaku. Cabang khusus dibentuk selain untuk sarana perjuangan dakwah di PTM juga dibentuk dalam rangka membantu cabang atau ranting Aisyiyah yang memerlukan nara sumber

5 Ibu Jufri Aksana adalah Anggota Pengurus Daerah Aisyiyah Kota Malang periode 2005-2010

6 Ibu Romlah, Ketua Aisyiyah Cabang Khusus, periode 2010-2015

dalam bidang keilmuan tertentu. Nah itu kita bisa menyediakan. Tidak usaha pusing memikirkan honor untuk mereka, karena cabang inilah yang nantinya akan berupaya memenuhi. Tapi kalau sekiranya mampu memberi honor yang berilah secara wajar" (Ibu Komariah⁷).

Sebagai cabang khusus yang baru berdiri, maka PCA khusus ini tidak memiliki Amal usaha. Atau bahkan, cabang ini berdiri di dalam Amal usaha yang sebenarnya bukan milik Aisyiyah tetapi milik organisasi induknya (Muhammadiyah). Dukungan finansial dari PTM sebagai Amal usaha terhadap PCA tidak justru menjadikan cabang ini berhenti melakukan usaha mencari sumber pendanaan organisasi. Misalnya dari salah satu pengurus menyatakan:

"Kita ini mbok jangan terus-terusan minta. Ya memang, bapak-bapak pimpinan sudah berkomitmen membantu pendanaan kita. Tetapi ya alangkah baiknya bila kita menggali sumber pendanaan sendiri. Kita sudah menggali sumber pendanaan dengan menerbitkan beberapa buku atau buku kecil. AlhamduLillah, ketika muk-tamar kemarin banyak laku terjual bu. Makanya kita mendorong anggota kita, siapa yang punya tulisan yang kira-kita menarik, kita mau bantu menerbitkan. Tentunya masih dikoridor bidang dakwah kita. Misal kita sudah menerbitkan buku tuntunan berdoa dan sholat. Buku tentang makanan halal dan thoyyib. Nah, hasil penjualannya untuk operasional cabang khusus ini. Sementara ini, sumber dana kita gali dari sini bu, biar ndak terus-terusan minta" (Ibu Romlah).

Kesadaran pentingnya sumber daya keuangan dalam menjalankan aktifitas organisasi menyebabkan pengurus melakukan inovasi dengan mendorong anggotanya menulis buku dan menerbitkan buku-buku itu untuk dijual. Kegiatan ini semata-mata untuk menggali dana yang bisa dipergunakan organisasi untuk membiayai kegiatan

operasional seperti membayar gaji staf administrasi.

Bab VIII Anggaran Dasar Aisyiyah tentang pendanaan yaitu pasal 35 tentang sumber dana, dikatakan dana organisasi diperoleh dari: (1) Uang pangkal, iuran, dan bantuan; (2) Sumbangan wajib organisasi (SWO); (3) Hasil hak milik organisasi; (4) Zakat, infak, shodaqoh, wasiat, dan hibah; (5) Usaha-usaha lain yang halal. Dari pengamatan selama di lapangan, yaitu pada level pengurus daerah, sumber dana terbesar tampak dari point 4 yaitu dari sisi zakat, infak, shodaqoh, wasiat, dan hibah. Dana tersebut kemudian dikonkritkan dalam dua bentuk pertama bentuk program/kegiatan dakwah, dan kedua diwujudkan menjadi Amal usaha. Contoh hasil wakaf yang diwujudkan dalam bentuk Amal usaha adalah TK ABA dan Klinik Aisyiyah.

Pendirian suatu sekolah tidak semata-mata bertujuan dakwah, ada misi sosial dan pendidikan. Memang tujuan yang pertama kali dari pendirian suatu sekolah, contohnya TK, adalah untuk berdakwah menyebarkan agama lewat pendidikan anak-anak. Kalau tujuan semata-mata dakwah dan tujuan sosial, tentunya pengurus tidak akan memperhitungkan bagaimana supaya sekolah itu banyak muridnya, atau bagaimana caranya memiliki guru yang baik dan bisa menggajinya dengan layak.

"TK ini kami dirikan dengan mencari pasar menengah yang tidak mungkin masuk ke TK Anak Sholeh dan TK Muslimat. Kami melihat ada potensi pasar disana. terbukti, sasaran kami ini tepat. Sehingga muridnya banyak, dan kami bisa membiayai sendiri TK ini, bisa mengaji guru dengan layak, tanpa memberatkan persyarikatan" (Ibu Noor Harini).

Dilain pihak, pengurus seringkali tidak mendapat kontribusi ekonomi secara layak. Motif sosial dari pengurus dikalahkan motif ekonomi mengelola Amal usaha. Segala keuntungan yang diperoleh Amal usaha dikembalikan lagi untuk mengembangkan Amal usaha.

"Ketika kita mengkidmatkan diri untuk menjadi Pembina (BPH stikes milik Aisyiyah) maka jangan terus memikirkan imbalan materi. Lebih sering malah tombok bu,

7 Ibu Komariah, Ketua Aisyiyah Cabang Khusus, periode 2005-2010

mengeluarkan uang dari kantong kita sendiri untuk keperluan organisasi. sekarang ini sebenarnya saya dapat sedikit materi ya untuk pantes-pantesan gitu dari sini, tetapi hampir separo lebih saya gunakan lagi untuk organisasi. Saya anggap sebagai zakat bu, toh saya tidak kekurangan materi” (Ibu Supi Zamroni⁸).

Akibatnya, sangat diperlukan seorang pengelola Amal usaha yang secara materi sudah mapan. Inilah yang mengakibatkan organisasi ini terlihat elit dari luar. Seolah-olah ini adalah organisasi yang anggotanya hanya orang yang secara materi berlebih. Padahal, keberadaan saudagar (atau orang yang secara materi mapan) dalam persyarikatan terbukti dapat membuat organisasi ini semakin besar.

“Sering kita menerima surat dari daerah yang meminta agar pengurus itu sebaiknya seseorang yang secara materi telah cukup. Agar kita dapat melaksanakan amanat KH Ahmad Dahlan Hidup-hidupilah Muhammadiyah jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Tapi kan sulit bu, mencari orang yang seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengelak bila masih ada yang mencari hidup di Amal usaha” (Ibu Supi Zamroni).

Meskipun pengurus mendapatkan dukungan materi baik dari Amal usaha ataupun sumber lain (iuran anggota) untuk menjalankan organisasi, namun hal ini tidak mematikan kreatifitas dalam menggali sumber dana. Misal dalam Amal usaha bermisi Sosial, yaitu Panti Asuhan Putri. Panti ini tidak berhenti melakukan kegiatan ekonomi untuk menggali dana. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk mendukung operasional panti. Diantaranya dengan menerima pesanan kue dan masakan, serta membuka butik busana muslim. Disamping mendapat keuntungan materi, usaha ini juga dimaksudkan untuk melatih anak asuh agar mandiri dan melatih kewirausahaan.

Kesadaran akan pentingnya sumber dana finansial membuat pengurus harus jeli melihat peluang yang ada tanpa kehilangan semangat berdakwah. Semangat

inilah sebenarnya yang membuat hidup Muhammadiyah yaitu dengan menggali potensi ekonomi sekaligus dengan niat beribadah.

Amal usaha dipandang sebagai aset ekonomi karena bentuknya yang nampak. Amal usaha seringkali menjadi semacam bukti prestasi seseorang dalam mengkidmadkan diri di persyarikatan.

“Alhamdulillah, ranting kami anggotanya banyak. Ketika kami lalu membuka sekolah TK ABA, ternyata mereka antusias sekali memasukkan putra-putrinya bersekolah di TK yang kami dirikan itu. Bahkan kami juga menerima murid yang orangtuanya bukan anggota persyarikatan” (Ibu Noor Harini).

Dengan bangga seorang yang berhasil mendirikan suatu Amal usaha akan memperjuangkan agar Amal usaha yang telah dirintisnya bisa berdiri dan tumbuh menjadi Amal usaha yang dapat dibanggakan. Misalnya dalam suatu sesi pengajian ramadhan yang diselenggarakan pengurus Cabang, penulis sering menerima selebaran yang berisi permintaan zakat, infaq dan shodaqoh dari seorang ibu, yang dengan bangga menyatakan beliau adalah yang mengurus Amal usaha itu. Seringkali peneliti menemui beberapa ibu yang aktif sebagai pengurus di suatu ranting begitu bangga menceritakan bahwa beliau telah berhasil mendirikan suatu Amal usaha. Atau tidak jarang, ada simpatisan yang dengan bangga menceritakan Amal usaha di daerahnya yang dapat mencapai prestasi.

“ Disamping duduk di Pengurus Pusat, saya juga mengurus Stikes Aisyiyah. Dan Alhamdulillah, sekolah yang saya bina ini semakin berkembang dan dapat dibanggakan persyarikatan Mahasiswa semakin banyak, kita juga dipercaya DIKTI, sehingga pengurus merasa perlu menambah gedung baru. Untuk itu saya sekarang ini sedang dalam proses membebaskan tanah untuk perluasan” (Ibu Supi Zamroni).

Dari beberapa pernyataan diatas, tampak keberhasilan mendirikan dan mengelola Amal usaha dapat menimbulkan perasaan bangga dalam diri ibu-ibu.

8 Ibu Supi Zamroni, Anggota Divisi Budaya Pengurus Pusat Aisyiyah periode 2005-2010

Amal usaha sebagai Aset Ekonomi ini berimplikasi pada beberapa upaya ekonomi yang dilakukan oleh pengurus. Upaya ekonomi ini dilatarbelakangi adanya kesadaran pentingnya sumber daya finansial untuk menjalankan Amal usaha sekaligus mewujudkan visi dan misi Organisasi. Upaya ekonomi ini berwujud nyata dalam ekonomi lain berbentuk pemberian otonomi kepada pengurus untuk mengelola Amal usaha dan sebagai simbol kebanggaan berorganisasi.

Produktifitas juga diterapkan pada pengelolaan wakaf sebagai upaya menjaga kepercayaan (amanah) sekaligus meningkatkan prestasi berorganisasi. Bentuk upaya untuk menggali produktifitas antara lain dilakukan pengurus dengan melakukan berbagai kegiatan ataupun strategi yang pada intinya untuk mencari sumber daya finansial secara mandiri dan tidak menggantungkan dukungan dana dari Pimpinan Pusat.

"Aisyiyah itu punya yang namanya Amal usaha. Dapat pula berarti Usaha Amal. Jadi kita melakukan usaha-usaha dengan tujuan bernal, menjalankan perintah Allah." (ibu Esty Martina Rachmie⁹)

Motif ekonomi mengelola Amal usaha (wujud "Usaha") berdampingan manis dengan motif sosial (wujud "Amal). Motif ekonomi bukan untuk pengurus, tetapi semata-mata untuk Amal usaha Aisyiyah. Motif ekonomi terbukti bukanlah sesuatu yang haram dalam menjalankan organisasi religius seperti Aisyiyah.

Upaya ekonomi dalam rangka menjamin kelangsungan sumber daya finansial berimplikasi ada diterapkannya mekanisme pemberian informasi (akuntansi) yang khas dan diikuti dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) baik atas sumber daya finansial yang diperoleh maupun sumber daya finansial yang telah dikelola. Amal usaha dengan demikian dimaknai pula sebagai sebagai sarana menjamin kelangsungan ibadah yang tidak bisa dilepaskan dengan digunakannya instrumen rasional dalam bentuk pemberian informasi (baik keuangan maupun sosial) dan pertanggungjawaban baik kepada persyarikatan Aisyiyah, kepada umat dan utamanya kepada Allah.

Mekanisme pertanggungjawaban Amal usaha mengacu pada pedoman yang telah dibuat oleh Pimpinan Pusat atau pembuat kebijakan di tingkat pemerintah. Oleh sebab itu, akuntansi yang diterapkan di beberapa Amal usaha tidak berujung pada *financial report/financial reporting* seperti dalam Akuntansi Keuangan. Mekanisme pertanggungjawaban di atas adalah pertanggungjawaban terhadap sesama manusia. Terdapat mekanisme pertanggungjawaban lain yang lebih diutamakan dalam diri tiap pengurus.

"Ketika penulis bertanya kepada beliau makna pertanggungjawaban, beliau secara spontan menjawab. Pertanggungjawaban itu adalah... (telunjuk beliau menunjuk ke atas) maksudnya pertanggungjawaban yang paling utama itu pada Allah. Semisal, beliau berkata. Saya sering membenahi laporan keuangan koperasi, karena mbak nur (pegawai administrasi) tidak paham dengan akuntansi. Suatu saat saya menemui jumlah selisih 30.000. sudah saya cari selisih itu gak ketemu. Saya tanya mbak nur juga saat itu dia sedang tidak ada di kantor. Nah, langsung saja saya tumbok dengan uang saya sendiri. Nah kalau saya gak ingat prinsip tanggungjawab di atas, kan mudah saja bagi saya yg orang akuntansi, membuat bukti kas keluar misal beli air mineral untuk menutup selisih tadi" (Ibu Umi Habibah¹⁰).

Sistem kepercayaan memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan mekanisme pertanggungjawaban di tiap Amal usaha. Sistem kepercayaan ini dibangun secara terus menerus melalui pengajian dan telaah Al-Qur'an dan Hadits. Karena akuntansi diterjemahkan sebagai "*situated practice*" (Booth, 1993:38) sehingga relevan saja bila kajian akuntabilitas dalam organisasi keagamaan diangkat dalam suatu penelitian. Beberapa peneliti yang mengangkat akuntansi dalam konteks organisasi keagamaan diladasi dengan motivasi bahwa kenyataannya mereka telah melihat dikotomi ekstrem dalam aktifitas sakral dan sekuler, seperti yang dikemukakan oleh Booth (1993:38):

9 Ibu Dr. Esty Martina Rachmie, Ketua Pengurus Wilayah Aisyiyah Jawa Timur 2010-2015

10 Ibu Umi Habibah adalah Bendahara Koperasi Bina Usaha Ekonomi Aisyiyah Kota Malang

“the case is thought to be extreme because of what these researcher see as a sacred-secular divide at play in such situation. The idea is that on one side of the divide we have accounting as a rational...basis for the legitimization of actions” whilst on the side of religion we have action legitimization through “myth”.

Bentuk organisasi non-profit tidak diartikan bahwa persyarikatan tidak memperhatikan ukuran profit dalam mengelola Amal Usahanya. *Profit* selain digunakan untuk membiaya operasional Amal usaha juga digunakan untuk jalankan visi dan misi organisasi keagamaan yaitu untuk berdakwah. Profit ini dihasilkan dari proses rasional yang mengacu pada akuntansi.

Aset ekonomi melibatkan aliran dana (financial) sehingga Amal usaha dapat diidentifikasi menerapkan Akuntansi yang didefinisikan sebagai *rational processes of everyday social, economic, and political life, which are involving financial aspects* (Sukoharsono 1995; 1996). Suatu Amal usaha baik yang masih berorientasi laba (Rumah Sakit, Sekolah, dan Koperasi) atau murni tidak berorientasi laba (Panti Sosial/Panti Asuhan), dalam pengelolaannya pasti melibatkan aliran sumber daya ekonomi. Amal usaha Rumah Sakit misalnya, memperoleh dana dari pendapatan penjualan jasa kepada pasiennya. Amal usaha sekolah, memperoleh dana dari pembayaran siswanya. Demikian pula Panti Asuhan, memperoleh dana dari sumbangan/donasi, baik dalam bentuk hibah, zakat, maupun shodaqoh. Sumber daya keuangan ini dikategorikan sebagai sumber daya ekonomi. Bentuk nyatanya uang (finansial), sehingga didalamnya dapat kita temukan proses rasional dalam pengelolaannya yang diidentifikasi sebagai aktifitas pencatatan aliran dana. Semua sumber daya ekonomi diperlakukan sebagai pendapatan. Sementara dilain pihak, kegiatan operasional Amal usaha berakibat pada timbulnya berbagai biaya atau beban. Pencatatan informasi jumlah pendapatan dan beban ini hanya bisa dilaksanakan dengan sarana instrument rasional.

Proses rasional ini mengacu pada akuntansi yang dikategorikan sebagai aktivitas sekuler pendukung aktifitas sakral dalam suatu organisasi religius (Hardy dan Ballis, 2005). Akuntansi digunakan untuk

mendukung aktifitas sakral dalam organisasi seperti dakwah, pengajian, dan kegiatan sosial. Akuntansi juga dipergunakan, untuk mengetahui informasi sumber daya keuangan yang berasal dari informasi pendapatan dan biaya. Tujuannya agar pengelola bisa mengambil keputusan ekonomi berkaitan dengan pengelolaan Amal usaha.

Kesadaran akan pentingnya akuntansi mendorong pengurus untuk membuat mekanisme pengelolaan yang bersifat wajib diterapkan dalam suatu Amal usaha. Ini yang dikatakan sebagai kewajiban. Bentuknya antara lain mekanisme pemberian informasi dan pertanggungjawaban melalui suatu struktur organisasi. Struktur organisasi ini menjadikan Aisyiyah dapat dikatakan telah menjalankan pengelolaan organisasi secara profesional.

Walau Aisyiyah organisasi religius, tetapi kepemilikan atas Amal usaha menjadikan instrumen rasional dibutuhkan dalam menjalankan program-programnya. Proses rasional yang melibatkan aliran finansial ini dikatakan sebagai bentuk Akuntansi dalam Aisyiyah. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan, makna aset ekonomi dalam Aisyiyah adalah Amal usaha yang dimiliki dan dikelola dengan instrumen pemberian informasi (Akuntansi) dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang di dalamnya terdapat usaha-usaha untuk mendatangkan keuntungan materi sekaligus mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam rangka mendatangkan keuntungan materi tersebut, dilakukan upaya-upaya ekonomi.

SIMPULAN

Amal usaha digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dan didirikan sebagai sarana beribadah. Motivasi ibadah ini mengakibatkan disisihkannya motif ekonomi dalam diri pengurus. Pengurus menjadi tidak berorientasi pada materi untuk dirinya sendiri. Motif mencari ekonomi dibatasi tujuan untuk membuat Amal usaha tetap berdiri dan bahkan berkembang.

Motif ekonomi dibatasi pada lingkup organisasi atau lingkup Amal usaha. Landasannya jelas, karena organisasi ini adalah organisasi religius yang seluruh aspek kehidupannya bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada manusia untuk beribadah kepada Allah. Kompensasi ekonomi yang diperoleh hanya sebagai sarana beribadah dan menjamin kelangsungan hidup suatu Amal usaha. Kelangsungan hidup suatu

Amal usaha diartikan sebagai jaminan tetap terlaksanakannya perjuangan organisasi sekaligus menjamin kelangsungan proses ibadah.

Amal usaha yang besar, dapat diartikan telah dikelola secara profesional dan menyokong kelangsungan hidup organisasi induk. Profesionalitas dengan menggunakan instrumen rasional termasuk akuntansi terbukti bukanlah suatu hal yang buruk dalam organisasi religius seperti Aisyiyah. Dengan demikian makna aset ekonomi dalam Persyarikatan Aisyiyah adalah Amal usaha yang dimiliki dan dikelola dengan instrumen pemberian informasi (Akuntansi) dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang didalamnya terdapat usaha-usaha untuk mendatangkan keuntungan materi sekaligus mewujudkan visi dan misi organisasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Accounting Standard Board (ASB). 2006. *Statement of Principles for Financial Reporting*, World Standard Setter Meeting, September 2006, page 4
- Anthony, R. N., dan V. Govindarajan. 2005. *Management Control System*, Salemba Empat, Jakarta
- Bakar, O. 1994. *Tauhid dan Sains: Esai-esai tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam*. Pustaka Hidayah, Jakarta
- Belkaoui, A. 1980. "The Interprofessional Linguistic Communication of Accounting Concepts: an Experiment in Sociolinguistic". *Journal of accounting research*, 18 (2), hal 362-374
- Berger, P. L. dan T. Luckmann. 1990. *Social Construction Theory*, Hasan Basari (Penerjemah). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, LP3ES, Jakarta
- Booth. P. 1993. "Accounting in churches: a research framework and agenda". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. 6 (4), hal 37-67.
- Denzin, N.K. dan Y. S Lincoln. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications
- Evans, L. 2004. "Language, Translation, and the Problem of International Accounting Communication". *Accounting, Auditing dan Accountability Journal*, 17 (2), hal 210-248
- Groenewald, T. 2004. "A Phenomenological Research Design Illustrated". *International Journal of Qualitative Methods*. 3 (1) April.
- Hardy, L. dan H. Ballis. 2004. "Does One Size Fit All? The Sacred and Secular Divide Revisited with Insights from Niebuhr's Typology of Social Action". *Accounting, Auditing dan Accountability Journal*. 18 (2), hal 238-254
- Haried, A. A. 1972. "The semantic dimension of financial statement". *Journal of Accounting Research*. 10 (2), hal 376-391
- Haried, A. A. 1973. "Measurement of Meaning in Financial Report". *Journal of Accounting Research*. 11 (1), hal 117-145
- Macintosh, N. B., Teri Shearer, Daniel B. Thornton, Michael Welker. 2000. "Accounting as Simulacrum and Hyperreality: Perspectives on Income and Capital". *Accounting, Organization and Society*. 25, hal 13-50
- Moustakas, C. 1994. *Phenomenological Research Methods*, Sage Publications, USA
- Nasr, S. H. 2005. *Antara Tuhan, Manusia, dan Alam: Jembatan Filosofis dan Religius Menuju Puncak Spiritual*. Ircisod, Yogyakarta
- Oliver, B. L. 1974. "The Semantic Differential: a Device for Measuring the Interprofessional Communication of Selecting Accounting Concepts". *Journal of Accounting Research*. 12 (2), hal 299-316
- Pengurus Pusat Aisyiyah. 2007. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah*, PPA, Yogyakarta
- Riduwan, A. 2009. *Semiotika Laba Akuntansi: Studi Kritis-Postmodernis Derridean*
- Stamper, R. 2000. "Understanding the Roles of Signs and Norms in Organization System Design". *Behavior dan Information Technology*, 19 (1), hal 15-27
- Sudibyo, B. 2001. *Telaah Epistemologis Standar Evidential Matter serta Implikasinya pada Kualitas Audit dan Integritas Pelaporan Keuangan*, *Seminar Nasional Akuntan Indonesia*, Surabaya.
- Sukoharsono, E. G. 1995. "Accounting, Colonial Capitalist, and Liberal Order: the Case of Accounting History in Indonesia during the Dutch Colonial of the Mid-to-End of the 19th Century". *The International Journal of Accounting and Business Society*, Vol. 3/1
- Sukoharsono, E. G. 2006. *Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi*,

- Phenomenologi, Grounded Theory, Ethnografi Kritis, dan Studi Kasus, *Analisis Makro dan Mikro*, BPFÉ Universitas Brawijaya, Malang, 230-245
- Triuwono, I, dan M. As'udi. 2001. *Akuntansi Syari'ah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, Salemba Empat, Jakarta
- Triuwono, I. 2007. Mengangkat "Sing Liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah, *Simposium Nasional Akuntansi 10, Makassar*
- Triuwono, I. 2009. *Perspektif, Methodology, dan Theory Akuntansi Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta
- Welman, Chris J. dan Stefanus J. Kluger. 1999. *Research Methodology for the Business and Administration Science*, International Thomson, Johannesburg